

Nomor Katalog : 3205005.3308

KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG

2021

Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2021

ISSN : 2776-7116
No Publikasi : 33080.2209
Katalog : 3205005.3308

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 46 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pencetak:

TM Percetakan

Sumber Ilustrasi:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat, baik secara nasional maupun regional. Setiap tahun perkembangan penduduk miskin dan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan menjadi pokok bahasan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan. Selain itu, pengentasan kemiskinan harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data kemiskinan yang akurat dan berkesinambungan serta data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk.

Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menerbitkan publikasi data kemiskinan dan pola konsumsi penduduk menurut jenis konsumsinya untuk memberi gambaran tentang tingkat kemiskinan makro dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang. Penerbitan publikasi ini guna memenuhi sebagian kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat luas akan data dan informasi yang semakin beragam.

Publikasi Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2021 tidak hanya memuat data tahun 2021 tetapi juga dalam beberapa tabel disajikan series data beberapa tahun terakhir. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun pada bulan Maret.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Kota Mungkid, Juni 2022
Kepala Badan Pusat statistik
Kabupaten Magelang

TOTO DESANTO, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
1 Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penyajian	4
2 Metodologi	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Konsep dan Definisi Kemiskinan.....	7
2.3 Penyebab Kemiskinan	8
2.4 Pengukuran Kemiskinan.....	9
2.4.1 Perhitungan Indikator Kemiskinan Provinsi.....	10
2.4.2 Perhitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota	10
2.5 Desain Pengukuran	12
2.6 Konsep dan Definisi Secara Umum	14
3 Analisis Kemiskinan	17
3.1 Kondisi Kemiskinan	17
3.1.1 Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2012-2021.....	17
3.1.2 Garis Kemiskinan (GK) Tahun 2012-2021.....	19
3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2012-2021.....	20
3.2 Karakteristik Penduduk Miskin.....	23
3.2.1 Pendidikan	23
3.2.2 Ketenagakerjaan	26

3.2.3	Fasilitas Perumahan.....	29
3.3	Program Penanggulangan Kemiskinan	30
4	Pola Konsumsi Penduduk	33
4.1	Rata-rata Pengeluaran Penduduk	33
4.2	Pola Konsumsi Penduduk.....	34
4.2.1	Pola Konsumsi Makanan	36
4.2.2	Pola Konsumsi Non Makanan.....	37
4.3	Pola Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.....	38
4.4	Pola Konsumsi Kalori Penduduk.....	40
4.5	Pola Konsumsi Protein Penduduk.....	42
5	Penutup	45

<https://magelangkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021.....	21
Tabel 3.3.2. Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima BPNT dan Rata-rata bantuan yang diterima, Tahun 2020-2021.....	31
Tabel 4.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2017-2021	34
Tabel 4.3. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2021.....	40
Tabel 4.4. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran Penduduk (Kkal), Tahun 2021	41
Tabel 4.5. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Gram), Tahun 2021	43

DAFTAR GAMBAR

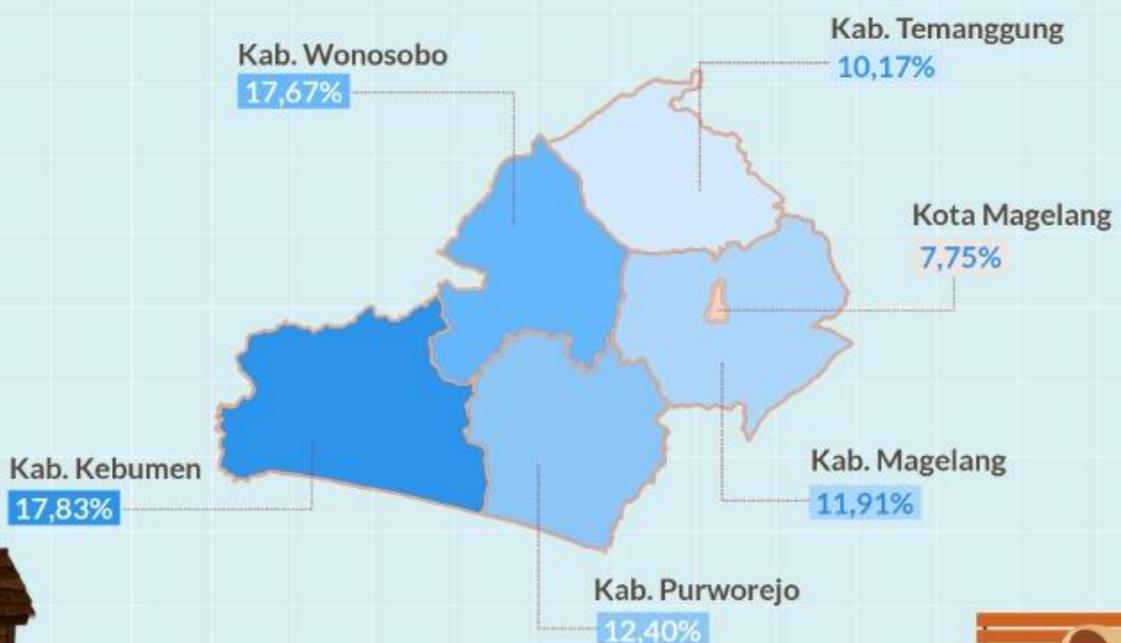
	Halaman
Gambar 3.1.1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2012-2021 18
Gambar 3.1.1.2	Persentase Penduduk Miskin Wilayah eks-Keresidenan Kedu Tahun 2021 18
Gambar 3.1.2.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2012-2021 19
Gambar 3.1.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Magelang Tahun 2012-2021..... 22
Gambar 3.2.1.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2021 24
Gambar 3.2.1.2.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Umur 15 – 24 Tahun dan 15 – 55 Tahun Tahun 2020-2021 25
Gambar 3.2.1.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7-15 Tahun Tahun 2020-2021..... 26
Gambar 3.2.2.1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2020-2021..... 27
Gambar 3.2.2.2.	Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan Tahun 2020-2021..... 28
Gambar 3.2.3	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Tahun 2020-2021..... 29
Gambar 4.1.	Perkembangan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, Tahun 2017-2021 35
Gambar 4.2.1.	Pola Konsumsi Makanan Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2021 36
Gambar 4.2.2.	Pola Konsumsi Non Makanan Menurut Kelompok Komoditas 2021 37
Gambar 4.3.	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Kelompok Pengeluaran Penduduk, Tahun 2021 38

KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGELANG 2021

Jumlah (Ribuan Orang) dan Persentase Penduduk Miskin 2012-2021



Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Keresidenan Kedu 2021



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik harus merupakan data kemiskinan yang dapat dipercaya, sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, bisa digunakan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu angka kemiskinan baru dihitung secara nasional. Kemudian mulai Tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin mulai disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Baru pada Tahun 2002, BPS menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas. Pada awalnya data kemiskinan dihitung 3 tahun sekali sesuai dengan pelaksanaan Susenas Modul konsumsi yang dilakukan setiap 3 tahun, mulai tahun 2012 sampai 2014 dilakukan penghitungan kemiskinan setiap tahun dengan pelaksanaan Susenas Modul Konsumsi triwulanan. Sejak tahun 2015 penghitungan angka kemiskinan didasarkan pada hasil Susenas Konsumsi Pengeluaran yang dilakukan setiap bulan Maret.

Arah dan tujuan pembangunan nasional mensyaratkan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat

berdasarkan dengan nilai kontribusi masing-masing. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk-

Berkaitan dengan hal-hal diatas dan untuk menjawab kebutuhan data perlu disusun publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2021” yang memuat data dan informasi tentang kondisi kemiskinan dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang.

1.2. Tujuan

Secara spesifik penerbitan publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2021” ini bertujuan memberikan data dan informasi tentang:

- i. perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2012-2021
- ii. perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2012-2021
- iii. perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2012-2021
- iv. karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021
- v. program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan Tahun 2020-2021
- vi. gambaran secara umum kondisi dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2021.
- vii. gambaran dan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan berkaitan dengan kemiskinan dan pola konsumsi penduduknya.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan secara sistematis dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, lingkup pembahasan, sumber data dan sistematika penyajian.

Bab dua berisi metodologi yang berisi sumber data, konsep dan definisi, penghitungan kemiskinan dan teori yang dipakai dalam analisis kemiskinan.

Bab tiga berisi tentang analisis kemiskinan yang berisi berbagai ukuran kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program bantuan pengentasan kemiskinan.

Bab empat berisi analisis pola konsumsi penduduk di Kabupaten Magelang.

Bab lima menyajikan masalah saran kebijakan yang berisi pentingnya data kemiskinan, strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dan pengaruh pola konsumsi penduduk.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Angka Kemiskinan dan Pola Konsumsi penduduk Tahun 2021 di Kabupaten Magelang dihitung berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021. Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015). Pengumpulan data rumah tangga diperoleh dari hasil wawancara langsung antara pencacah dan responden yang mewakili rumah tangga bersangkutan

2.2. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain;

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan

pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

3. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Pendekatan obyektif and subyektif, pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, sedangkan pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.

2.3. Penyebab Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1. kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
2. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
5. adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);

6. rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
8. tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
9. pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.4. Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan pendekatan kebutuhan dasar atau dengan kata lain, konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Bank Dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan:

1. Menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kilokalori per hari.
2. Garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (*purchasing power parity*) 1,25 dolar AS dan 2 dolar AS, sehingga dapat digunakan sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara. Nilai tukar PPP 1 dolar AS mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dolar atau dua dolar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan makro menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk. Konsep yang digunakan adalah dengan konsep moneter bahwa kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan dalam pendekatan pengeluaran rumah tangga (Jousairi Hasbullah). Metode yang dipakai BPS ini juga dipakai 50 persen negara berkembang dari 84 negara berkembang menurut inventarisasi dari *United Nation Statistic Division*.

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Konsumsi.

2.4.1. Perhitungan Indikator Kemiskinan Provinsi

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya harga implisit ratarata kalori tersebut dikalikan dengan 2100.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas konsumsi pengeluaran. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004). SPKKD 2004 dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas konsumsi pengeluaran.

GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya dihitung indikator kemiskinan tingkat provinsi.

2.4.2. Perhitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota

Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota dan estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan.

Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan cara:

$$GKS_{ij}^t = GK_{ij}^{t-1} \times (1 + (E_j \times I_{ij}))$$

Dimana:

GKS_{ij}^t = Garis kemiskinan sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j tahun t

GK_{ij}^{t-1} = Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j tahun t-1

E_j = Elastisitas provinsi ke-j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-j terhadap inflasi provinsi ke-j)

I_{ij} = Inflasi kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j

Catatan:

- Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke-idigunakan elastisitas provinsi ke-j di level perdesaan.
 - Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke-idigunakan elastisitas provinsi ke-j di level perkotaan.
 - Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan *sister city*)
2. Menentukan PO sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan PO provinsi ke-j periode tke t-1 dengan PO kabupaten ke-ipada tahun t-1.
 3. Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan PO sementara.
 4. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. *Head Count Index (HCI-P₀)*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha},$$

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $a=0$, diperoleh *Head Count Index (P₀)*, jika $a=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan jika $a=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*).

2.5. Desain Pengukuran

Pengukuran tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat tersebut ternyata masih sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumahtangga dari hasil Susenas. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan sama dengan distribusi pendapatan. Namun cara ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, walaupun harus diinterpretasikan secara hati-hati.

Melalui kegiatan Susenas, nilai pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumahtangga perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh

masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok bukan makanan.

A. Konsumsi makanan, meliputi :

1. Konsumsi padi-padian (beras, jagung terigu, dll)
2. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dll)
3. Konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (segar dan diawetkan)
4. Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dll)
5. Konsumsi telur dan susu
6. Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dll)
7. Konsumsi kacang-kacangan
8. Konsumsi buah-buahan
9. Konsumsi minyak dan lemak
10. Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dll)
11. Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dll)
12. Konsumsi lainnya (mie instan/basah, bihun, makaroni, kerupuk dll)
13. Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol)
14. Konsumsi tembakau dan sirih.

B. Konsumsi non makanan, meliputi :

1. Perumahan dan fasilitas rumahtangga (sewa/perkiraan sewa, pemeliharaan/perbaikan ringan, rekening listrik/air/telepon, gas, minyak tanah, pulsa dll)
2. Aneka barang dan jasa (sabun/kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya).
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama (alat rumahtangga, elektronik dll)
5. Pajak, pungutan dan asuransi.
6. Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan.

Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran bukan makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

2.6. Konsep dan Definisi Secara Umum

Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu.

Anggota rumah tangga/ Penduduk

Anggota Rumah Tangga (ART) / penduduk adalah orang yang biasanya tinggal dalam satu rumah tangga, baik yang berada didalam rumah tangga saat pencacahan maupun yang sementara sedang tidak ada. Orang yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan untuk menetap ditempat lain/pindah tidak termasuk ART. Dan orang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap dianggap sebagai ART.

Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan pesta dan upacara). Konsumsi yang dimasukkan disini tidak memperhatikan asal barang atau jasa, jadi baik dari pembelian, pemberian, dan produksi sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga semua dimasukkan dalam pencacahan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga yang digunakan rumah tangga lain atau diberikan kepada pihak lain tidak dimasukkan dalam pencacahan konsumsi rumah tangga.

Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Dalam kenyataan dilapangan, informasi tentang pendapatan tidak seperti yang diharapkan karena banyak responden cenderung menyembunyikan informasi pendapatan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, data pendapatan diperkirakan dari data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

Pendidikan

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah

Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Bekerja di kegiatan informal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar. Bekerja di kegiatan formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

Pengeluaran Per Kapita Untuk Makanan

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan dan non makanan).

Fasilitas Perumahan

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum terlindung yang meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk jika air minum utamanya menggunakan air kemasan bermerk atau air isi ulang dan sumber air utama air mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

BAB 3

ANALISIS KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta profil rumah tangga miskin.

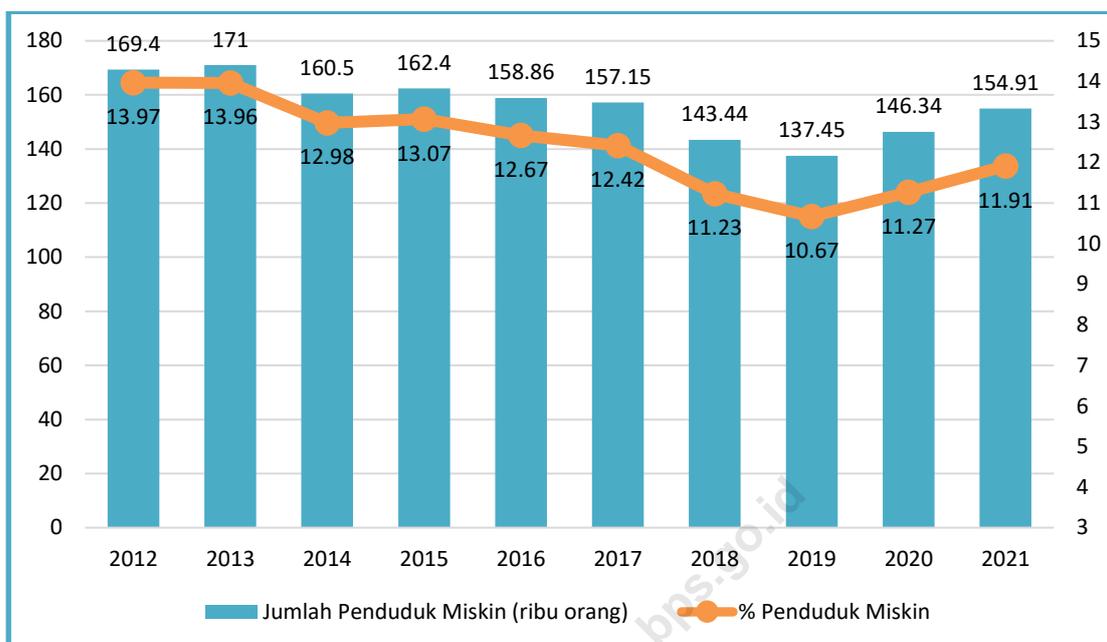
3.1. Kondisi Kemiskinan

3.1.1. Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2012-2021

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode tahun 2012-2021 ditunjukkan pada Gambar 3.1.1. Secara umum, pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian terjadi kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2014-2015 dan tahun 2019-2021. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 154,91 ribu jiwa (11,91 persen), naik dibanding tahun 2020 yang sebesar 146,34 ribu jiwa (11,27 persen). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan penduduk miskin sebesar 0,64 persen poin atau sebanyak 8,57 ribu jiwa.

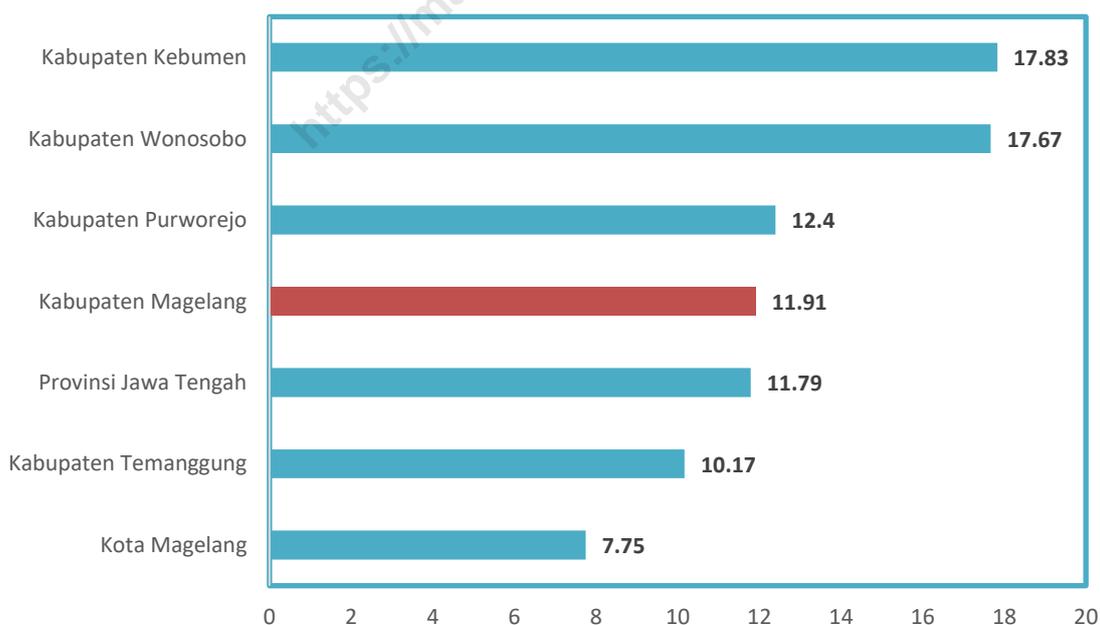
Selama periode 2012-2021, persentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Magelang terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,67 persen, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 13,97 persen. Dalam rentang kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah berhasil mengentaskan 14,49 ribu penduduk miskin, dengan nilai yang berfluktuasi di tiap tahunnya.

Gambar 3.1.1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang
Tahun 2012 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar 3.1.1.2
Persentase Penduduk Miskin Wilayah eks-Keresidenan Kedu Tahun 2021



Sumber : Susenas Maret 2021

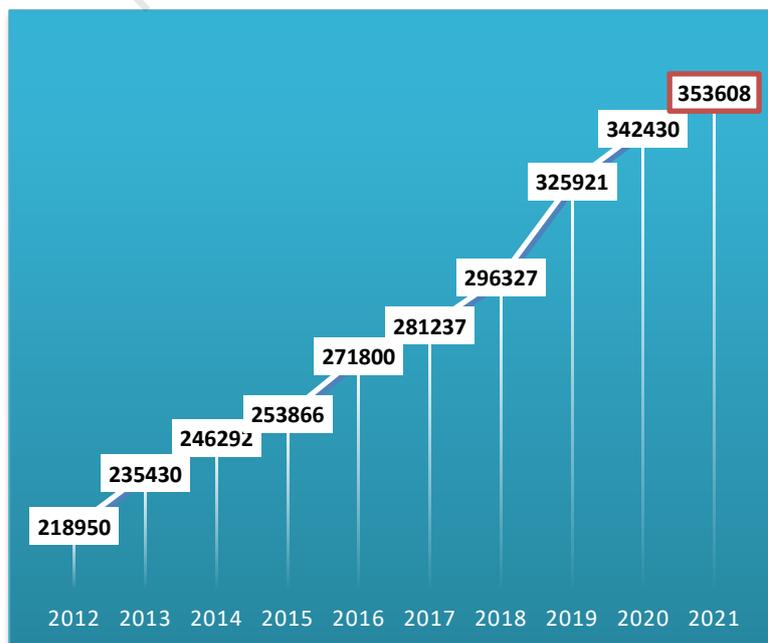
Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa

Tengah. Di wilayah eks-Keresidenan Kedu, Kota Magelang memiliki persentase penduduk miskin terendah sebesar 7,75 persen, dilanjutkan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang berturut-turut sebesar 10,17 persen dan 11,91 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Kebumen, yaitu sebesar 17,83 persen lebih dari dua kali lipat persentase penduduk miskin di Kota Magelang.

3.1.2. Garis Kemiskinan Tahun 2012-2021

Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) dengan menentukan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara 2 100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kemiskinan adalah garis yang menunjukkan nilai minimal dari suatu rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak masuk dalam kelompok rumah tangga miskin. Seseorang dalam suatu rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan akan masuk dalam kelompok penduduk miskin. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Gambar 3.1.2.

Gambar 3.1.2.
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang
Tahun 2012-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Garis kemiskinan Kabupaten Magelang menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, garis kemiskinan meningkat sekitar Rp. 134 658,-. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Magelang meningkat sebesar Rp 11 178,- atau naik 3,26 persen dari tahun 2020, yaitu dari Rp. 342 430,- per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp. 353 608,- per kapita per bulan pada tahun 2021. Hal ini bisa terjadi karena adanya kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi yang berakibat pada naiknya biaya hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2012-2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator *Headcount Index/Head Count Ratio* (P_0) atau dengan melihat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2). Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur hal tersebut yaitu dengan tingkat keparahan kemiskinan. Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan atau dengan kata lain distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 3.1.3.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 – 2021

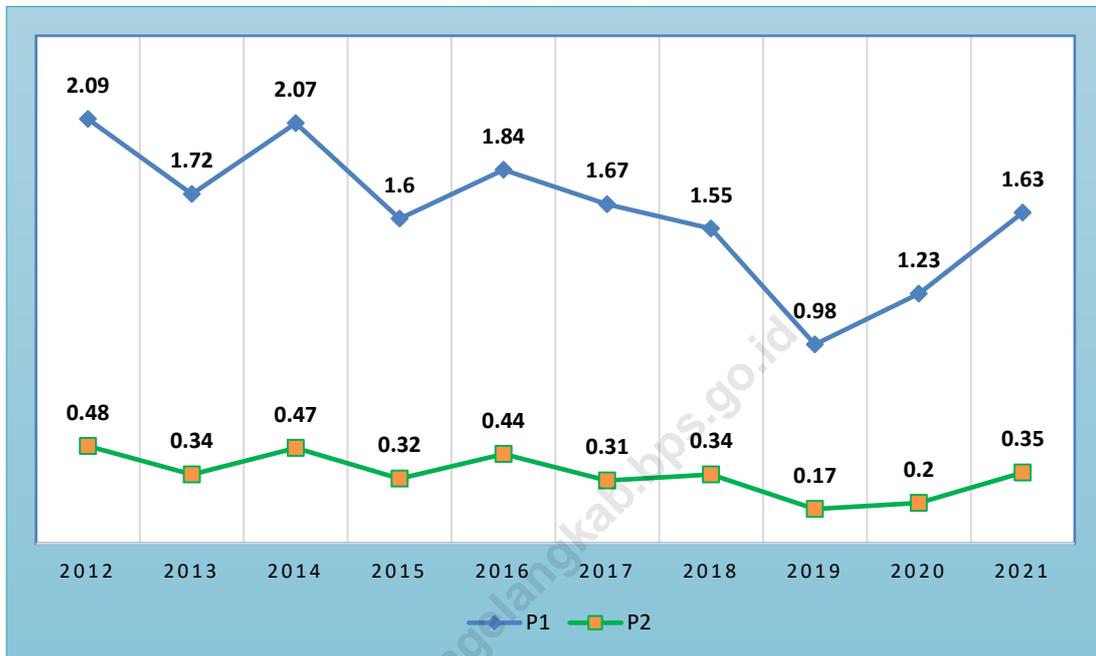
No	Tahun	P_1 (Kedalaman Kemiskinan)		P_2 (Keparahan Kemiskinan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2012	2,09	2,39	0,48	0,57
2	2013	1,72	2,37	0,34	0,59
3	2014	2,07	2,25	0,47	0,56
4	2015	1,60	2,44	0,32	0,65
5	2016	1,84	2,37	0,44	0,63
6	2017	1,67	2,21	0,31	0,57
7	2018	1,55	1,85	0,34	0,45
8	2019	0,98	1,53	0,17	0,30
9	2020	1,23	1,72	0,20	0,34
10	2021	1,63	1,91	0,35	0,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pada periode 2012-2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,09 pada tahun 2012 menjadi 1,63 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang ditandai dengan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin rendah. Dalam 10 tahun terakhir, nilai ini memperlihatkan angka yang berfluktuasi dengan nilai yang naik turun tidak berpola. Hal positif yang bisa kita lihat adalah nilai kedalaman kemiskinan berkisar di angka 0,98 sampai 2,09. Nilai tersebut menunjukkan kondisi yang lebih stabil dan semakin mudah mengentaskan kemiskinan karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinannya. Akan tetapi terjadi peningkatan indeks

kedalaman kemiskinan pada dua tahun terakhir yaitu dari kondisi terendah 0,98 pada tahun 2019 menjadi 1,63 pada tahun 2021

Gambar 3.1.3.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Magelang
Tahun 2012 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Indeks keparahan kemiskinan kadangkala tidak sejalan dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan. Pada saat indeks kedalaman kemiskinan menurun, bisa kita temui nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan peningkatan. Hal ini terjadi karena kenaikan tingkat pengeluaran penduduk tidak terjadi merata di semua rumah tangga sehingga muncul nilai ketimpangan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2012 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,48 menjadi 0,35 di tahun 2021 atau selama kurun waktu 10 tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan turun 0,13 poin. Indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,48 dan terendah di Tahun 2019 yang sebesar 0,17.

Kondisi yang sama dengan indeks kedalaman, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir, yaitu meningkat sebesar 0,18 poin dari tahun 2019. Jika melihat fluktuasi nilai indeks keparahan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir terlihat nilai kesenjangan pendapatan dan pengeluaran diantara penduduk

miskin tidak terlalu besar, nilainya tidak pernah berubah secara signifikan hanya dalam range 0,17-0,48.

Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks maka kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Hal ini juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap program pengentasan kemiskinan karena akan mempermudah usaha pengentasan kemiskinan karena kondisi penduduk miskin semakin homogen.

3.2. Karakteristik Penduduk Miskin

3.2.1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan. Tingkat pendidikan penduduk sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena tingkat pendidikan berperan dalam pembentukan karakter, pola pikir, kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat, dan tingkat kepercayaan diri penduduk untuk bersaing di dunia kerja. Tidak hanya berguna dalam persaingan dalam mencari pekerjaan namun juga berperan dalam ketangguhan penduduk dalam usaha untuk mencari alternatif penghidupan yang lebih baik. Bagi pemerintah, pembangunan dalam bidang pendidikan juga untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi ketimpangan pendapatan dan akhirnya mengentaskan masalah kemiskinan.

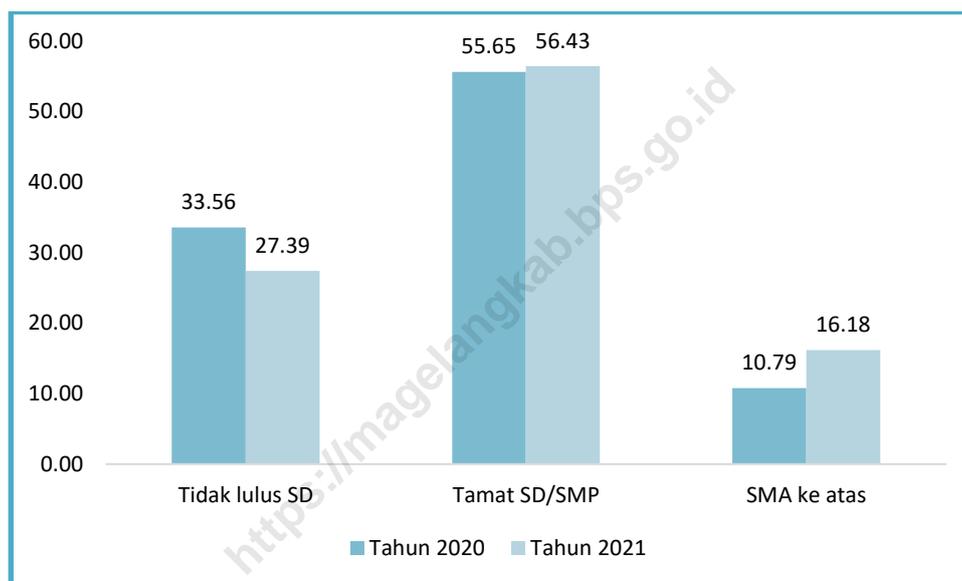
Pada kondisi rumah tangga miskin, pendidikan tentu belum menjadi prioritas karena bagi mereka memenuhi kebutuhan primernya saja masih mengalami kesulitan. Dengan kondisi ini, kemiskinan akan menjadi lingkaran setan, dimana anak yang lahir dari keluarga miskin akan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga kedepannya dengan pendidikan yang rendah hanya bisa mendapatkan pekerjaan yang hasilnya tidak tetap dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam masalah pendidikan, pemerintah memang sudah membuat berbagai program untuk mengentaskan masalah pendidikan. Program tersebut diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dengan program tersebut untuk tingkat pendidikan dasar negeri (setingkat SD dan SMP) bisa digratiskan dalam biaya bulanan. Bahkan mulai Tahun 2017 Bantuan Operasional Sekolah sudah bertambah sampai ke

jenjang SMA dan di tahun 2021. Selain itu ada program Indonesia Pintar maupun Bantuan Siswa Miskin serta Program Keluarga Harapan. Diharapkan dengan berbagai program ini dapat digunakan sebagai solusi untuk peningkatan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat gambaran pendidikan antara lain tingkat pendidikan yang ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.

Gambar 3.2.1.1.
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020 – 2021

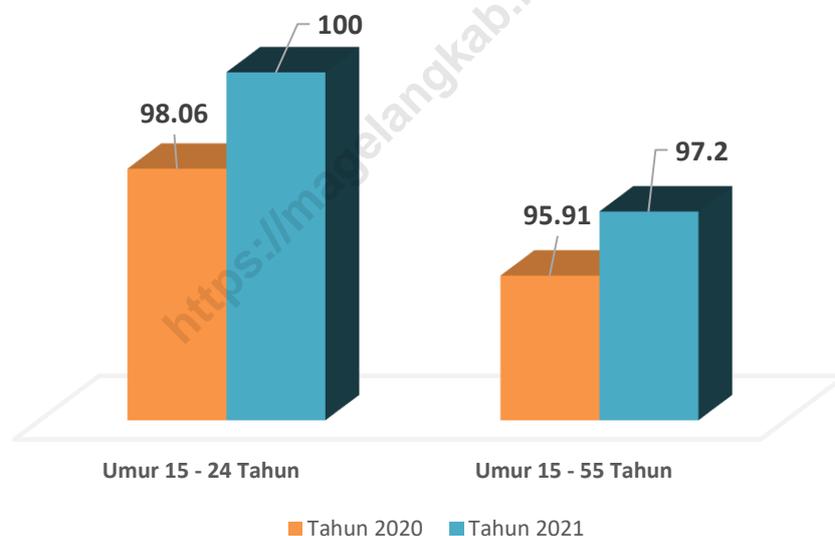


Sumber : Susenas Maret, 2020-2021

Gambaran tingkat pendidikan penduduk miskin umur 15 tahun ke atas berdasarkan hasil Susenas Maret Tahun 2020-2021 dapat dilihat bahwa lebih dari separuh penduduk miskin berpendidikan Tamat SD/SMP, urutan kedua untuk kelompok penduduk miskin yang tidak berpendidikan dan yang paling sedikit adalah kelompok pendidikan SMA keatas. Selama periode 2020-2021, sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas cenderung tamat SD dan SMP berturut-turut sebanyak 55,65 persen, 56,43 persen. Sedangkan untuk penduduk miskin dengan pendidikan SMA ke atas meningkat sebesar 5.39 persen poin dari tahun 2020. Dapat dilihat bahwa selama dua tahun terakhir, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk miskin mengalami peningkatan baik tamat SD/SMP maupun tamat SMA ke atas.

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis minimal dalam satu kalimat sederhana. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Membaca dan menulis disini tidak harus huruf latin, namun juga bisa huruf hijaiyah, atau huruf lainnya misal aksara jawa atau huruf kanji. AMH penduduk miskin untuk kelompok usia pendidikan yaitu di umur 15 – 24 tahun dari hasil Susenas Maret 2021 yaitu 100 persen, artinya semua penduduk miskin usia 15-24 tahun sudah bisa membaca huruf latin dan huruf lainnya. Untuk kelompok umur 15 – 55 tahun, terjadi peningkatan sebesar 1,29 persen poin dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Gambar 3.2.1.2.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Umur 15 – 24 Tahun dan 15 – 55 Tahun Tahun 2020 – 2021

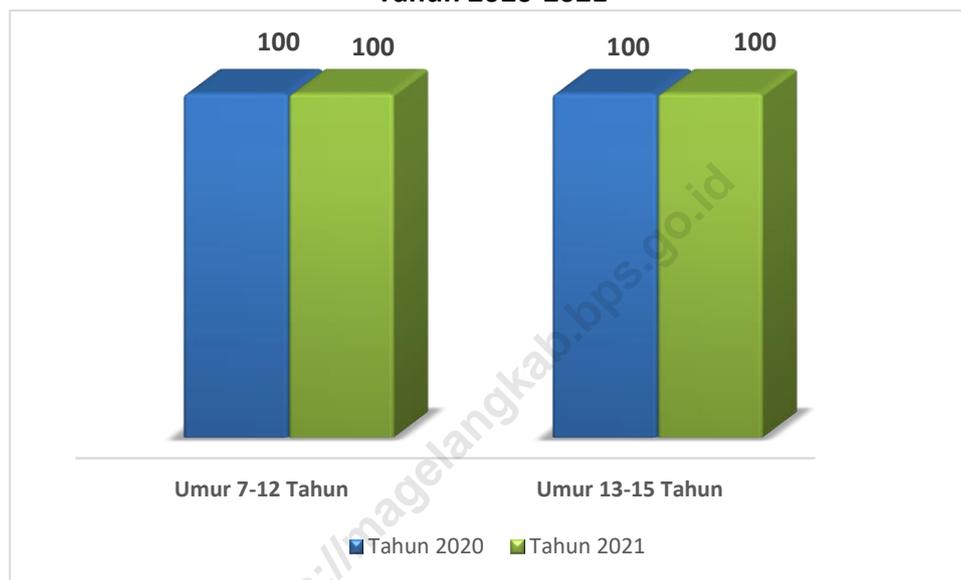


Sumber : Susenas Maret, 2020-2021

Kemampuan membaca dan menulis penting bagi kehidupan manusia karena melalui tulisan banyak ilmu dan pengetahuan yang akan diperoleh. Pengetahuan yang tepat dan sesuai akan membuka wawasan sehingga memberi banyak alternatif pilihan dalam hidup yang diharapkan akan memperbaiki cara hidup dan kemampuan bertahan hidup, bahkan mungkin untuk meningkatkan kemampuan secara ekonomi dan melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan penduduk adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan ini memasukkan pendidikan non formal yaitu kejar paket A, Paket B dan Paket C.

Gambar 3.2.1.3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7 – 15 Tahun
Tahun 2020-2021



Sumber : Susenas Maret, 2020-2021

Dari Hasil Susenas, APS penduduk miskin umur 7 – 12 tahun selama kurun waktu dua tahun terakhir sudah mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa semua penduduk miskin yang berumur 7 – 12 Tahun masih bersekolah. Sedangkan untuk kelompok umur 13 – 15 tahun, nilai APS selama kurun waktu dua tahun terakhir juga sudah mencapai 100 persen.

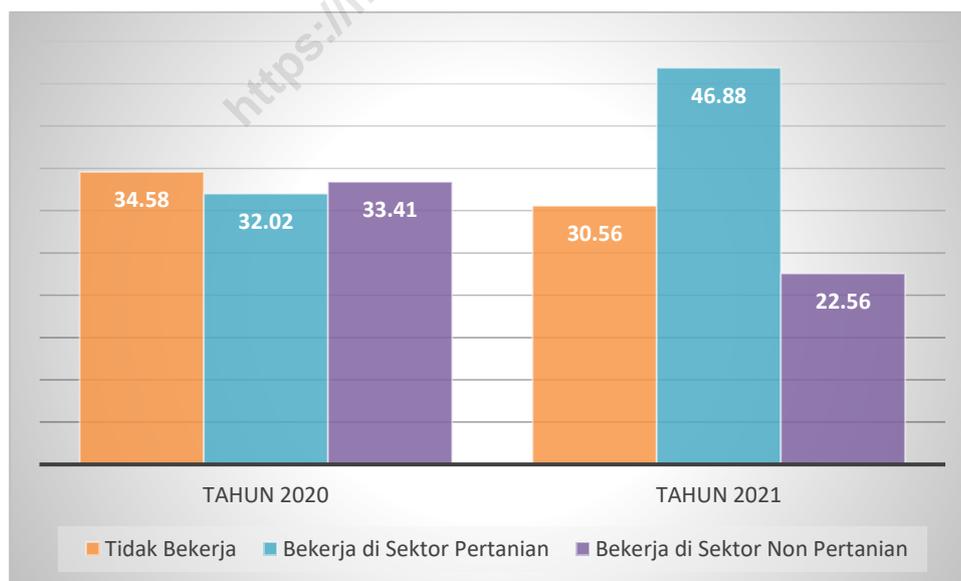
3.2.2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan dalam masalah kemiskinan juga memegang peranan penting. Ketenagakerjaan berkaitan dengan sumber penghasilan rumah tangga yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penggolongan penduduk miskin dan tidak miskin suatu rumah tangga juga didasarkan pada tingkat kesejahteraan yang

ditentukan oleh rata-rata pengeluaran rumah tangga perkapita perbulan. Besarnya pengeluaran rumah tangga tentunya juga dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diperoleh oleh semua anggotarumah tangga berdasarkan pekerjaan masing-masing.

Masalah ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penduduk yang bekerja. Bekerja disini adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Dari hasil pendataan Susenas, persentase penduduk miskin yang tidak bekerja pada tahun 2021 sebesar sebesar 30,56 persen yaitu turun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 34,58 persen. Jumlah penduduk miskin yang bekerja tersebut di dominasi oleh penduduk yang bekerja di sector pertanian yaitu sebesar 46,88 persen di tahun 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 32,02 persen. Sementara itu, terjadi penurunan angka penduduk miskin yang bekerja di sektor non pertanian sebesar 22,56 persen di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 33,41 persen.

Gambar 3.2.2.1
Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke Atas
menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2020- 2021

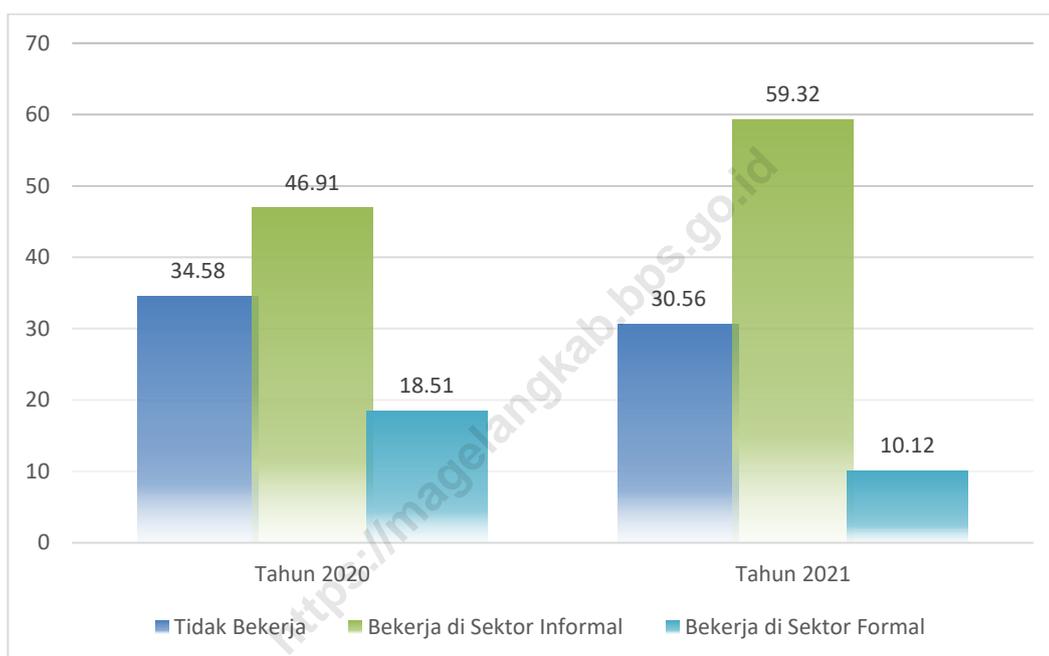


Sumber : Susenas Maret, 2020-2021

Karakteristik penduduk miskin dilihat dari sisi ketenagakerjaan yang lain adalah status pekerjaan, yaitu penduduk yang bekerja di sektor formal dan sektor informal. Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status kedudukan

dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang status kedudukan dalam pekerjaannya adalah bekerja sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Gambar 3.2.2.2
Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas
menurut Status Pekerjaan Tahun 2020-2021



Sumber : Susenas Maret, 2020 - 2021

Persentase penduduk miskin umur 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan di Kabupaten Magelang pada periode tahun 2020-2021 ditunjukkan pada Gambar 3.2.2.2. Dilihat dari grafik diatas, selama tahun 2020-2021, penduduk miskin di Kabupaten Magelang didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin cenderung mempunyai pekerjaan yang tidak tetap/pekerja bebas atau pekerjaan yang belum mapan sehingga sangat berpengaruh dalam kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2021, lebih dari setengah penduduk miskin umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang bekerja di sektor informal yaitu sebanyak 59,32 persen dan bekerja di sektor formal 10,12 persen.

3.2.3 Fasilitas Perumahan

Fasilitas yang dimiliki oleh suatu tempat tinggal mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Tingkat kesehatan tempat tinggal juga mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang tinggal didalamnya. Ketersediaan air bersih terutama untuk fasilitas air minum dan fasilitas jamban yang dimiliki rumah tangga bisa dijadikan indikator untuk menunjukkan rumah sehat.

Ketersediaan fasilitas air bersih untuk sumber air minum penduduk miskin menunjukkan nilai yang cukup baik. Pembangunan dalam bidang sanitasi yang menjadi perhatian pemerintah membuat fasilitas tersebut bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih layak konsumsi dan yang menggunakan jamban sendiri/bersama selama periode 2020-2021 dapat ditunjukkan pada gambar 3.2.3.

Gambar 3.2.3.
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Tahun 2020-2021



Sumber : Susenas Maret, 2020 - 2021

Secara umum, selama kurun waktu dua tahun terakhir, terjadi peningkatan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih layak konsumsi. Rumah tangga pengguna air layak yang dimaksud disini adalah air minum yang sumbernya dari air terlindung yaitu ledeng meteran, ledeng eceran, dan sumur bor/pompa, sumur

terlindung, dan mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran atau limbah lebih dari 10 meter atau air minum yang sumbernya dari air terlindung namun jarak ke penampungan kotoran/limbah kurang dari 10 m atau air tidak terlindung tapi sumber untuk mandi/cuci dan lain-lain dari air terlindung. Pada periode 2020-2021 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin yang menggunakan air bersih layak konsumsi yaitu dari 82,63 persen menjadi 90,77 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sarana dan prasarana air bersih layak konsumsi yang dinikmati oleh penduduk miskin di Kabupaten Magelang.

Selain itu, ketersediaan jamban menjadi salah satu indikator dalam melihat baik buruknya fasilitas perumahan. Selain ketersediaan jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga melihat ketersediaan jamban tersebut milik sendiri, jamban bersama, jamban umum, dan tidak tersedianya fasilitas jamban. Pada tahun 2021, penggunaan jamban sendiri atau bersama penduduk miskin sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 83,04 persen menjadi 81,67 persen.

3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastera, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT termasuk Kabupaten Magelang. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (*cashless*) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako adalah: 1) Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu, 2) Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan, 3) Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu., dan 4) Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan. Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

Tabel 3.3.2
Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima BPNT/Program Sembako dan Rata-rata Banyaknya Bantuan yang diterima Tahun 2020-2021

Komponen	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)
Persentase Penerima BPNT (persen)	45,52	55,53
Rata-Rata Beras yang Diterima (Kg)	9,71	11,64
Rata-rata Harga (kg)	11 343	10 836

Pada tahun 2021, sebanyak 55,53 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Magelang menerima BPNT/Program Sembako dari pemerintah. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 45,52 persen rumah tangga miskin penerima BPNT/Program Sembako. Rata-rata beras yang diterima juga mengalami kenaikan yaitu dari 9,71 kg di tahun 2020 menjadi 11,64 kg di tahun 2021.

BAB 4

POLA KONSUMSI PENDUDUK

4.1. Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Keadaan ekonomi rumah tangga di suatu daerah dapat diamati dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga, atau dapat dikatakan juga bahwa tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan konsumsi rumah tangga.

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Kebiasaan makan seseorang dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi merupakan pengaruh faktor fisiologis, psikologi, dan sosial budaya. Namun ada pengaruh lain yang merubah pola makan, seperti pada saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat banyak beraktivitas dari rumah. Pada awal pandemi bulan Maret 2020, pemerintah menganjurkan agar bekerja, belajar, dan beribadah di rumah sehingga mendorong masyarakat melakukan pembelian makanan mencegah Covid-19 dan kebutuhan pokok lainnya sebagai stock persediaan untuk beberapa waktu mendatang, sehingga mengakibatkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tersebut. Pandemi ini berdampak pada pendapatan rumah tangga menurun dan konsumsi makanan meningkat.

Tabel 4.1 menyajikan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021. Secara umum, rata-

rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan dan non makanan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya konsumsi penduduk yang dipengaruhi oleh kuantitas konsumsi dan inflasi. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan meningkat hampir tiga ratus ribu rupiah dari Rp.653 538,- di tahun 2017 menjadi Rp 947 904,- di tahun 2021 . Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan pada tahun 2017 sebesar Rp. 323 814,- dalam lima tahun terakhir meningkat hampir mencapai seratus empat puluh ribu rupiah, yaitu menjadi Rp. 457 815,- pada tahun 2021. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok non makanan tahun 2017 sebesar Rp. 329 724,- dalam lima tahun terakhir meningkat lebih dari seratus enam puluh ribu rupiah yaitu menjadi Rp. 490 089,- pada tahun 2021.

Tabel 4.1.
Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan Tahun 2017-2021 (Rp)

Tahun	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran	
		Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	947 904	457 815	490 089
2020	911 250	433 844	477 407
2019	887 835	409 228	478 607
2018	799 654	394 239	405 415
2017	653 538	323 814	329 724

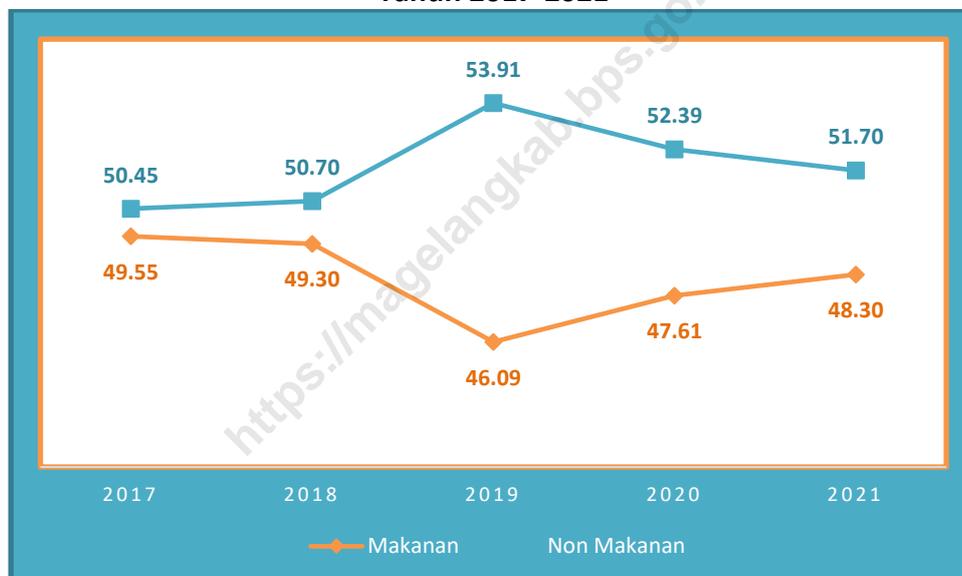
Sumber : Susenas Maret, 2017-2021

4.2. Pola Konsumsi Penduduk

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran penduduk didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran penduduk baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran penduduk dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari penduduk yang bersangkutan.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Seiring dengan kenaikan pendapatan, persentase untuk pengeluaran makanan akan berkurang, tergantikan oleh pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di banyak wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan energi.

Gambar 4.1
Perkembangan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang,
Tahun 2017-2021



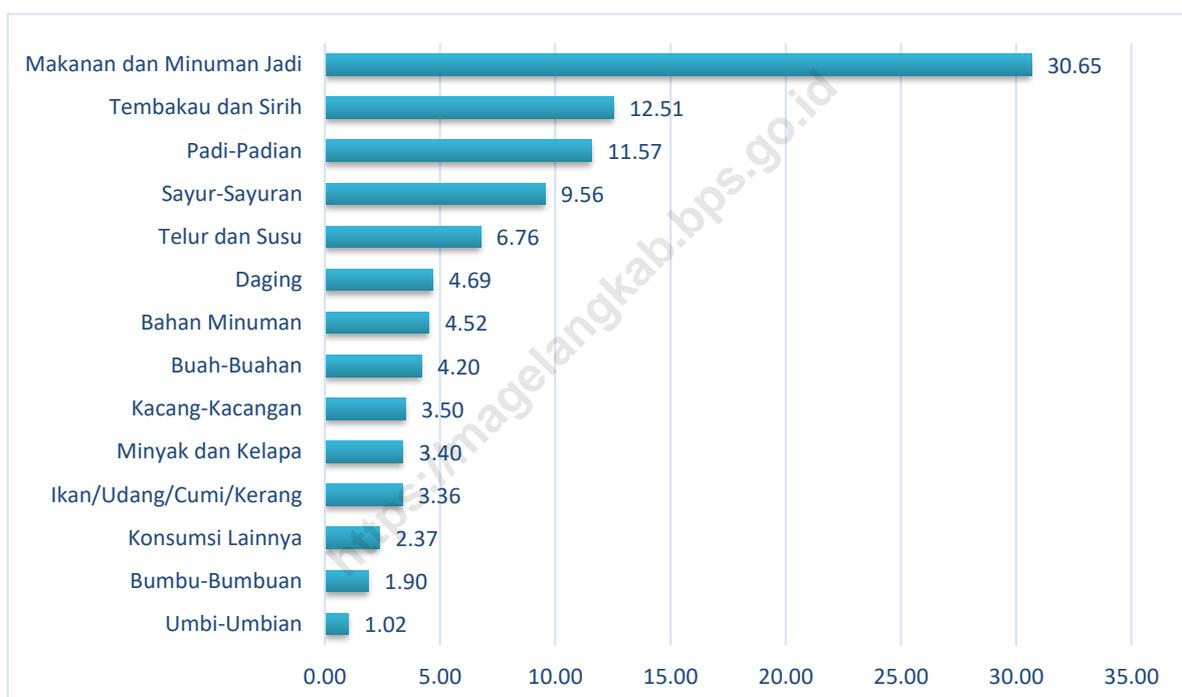
Sumber : Susenas Maret 2017-2021

Gambaran perkembangan pola konsumsi rumah tangga Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021 tersaji dalam Gambar 4.1. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, konsumsi non makanan selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi makanan dengan nilai yang berfluktuasi setiap tahunnya. Komposisi pengeluaran makanan pada tahun 2021 sebesar 48,30 persen, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 47,61 persen. Sementara pengeluaran untuk Non Makanan mengalami penurunan dari 52,39 persen di tahun 2020 menjadi 51,70 persen di tahun 2021. Kondisi ini menjelaskan terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk miskin untuk mengurangi konsumsi dari non makanan ke kebutuhan makanan.

4.2.1 Pola Konsumsi Makanan

Pengeluaran kelompok makanan meliputi pengeluaran untuk bahan makanan yang berupa padi-padian, umbi, ikan, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan, dan lainnya, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi, dan pengeluaran untuk rokok dan tembakau. Rata-rata pengeluaran masing-masing kelompok komoditas makanan per kapita sebulan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran seluruh komoditas makanan didapatkan persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan.

Gambar 4.2.1
Pola Konsumsi Makanan menurut Kelompok Komoditas Tahun 2021



Sumber : Susenas Maret 2021

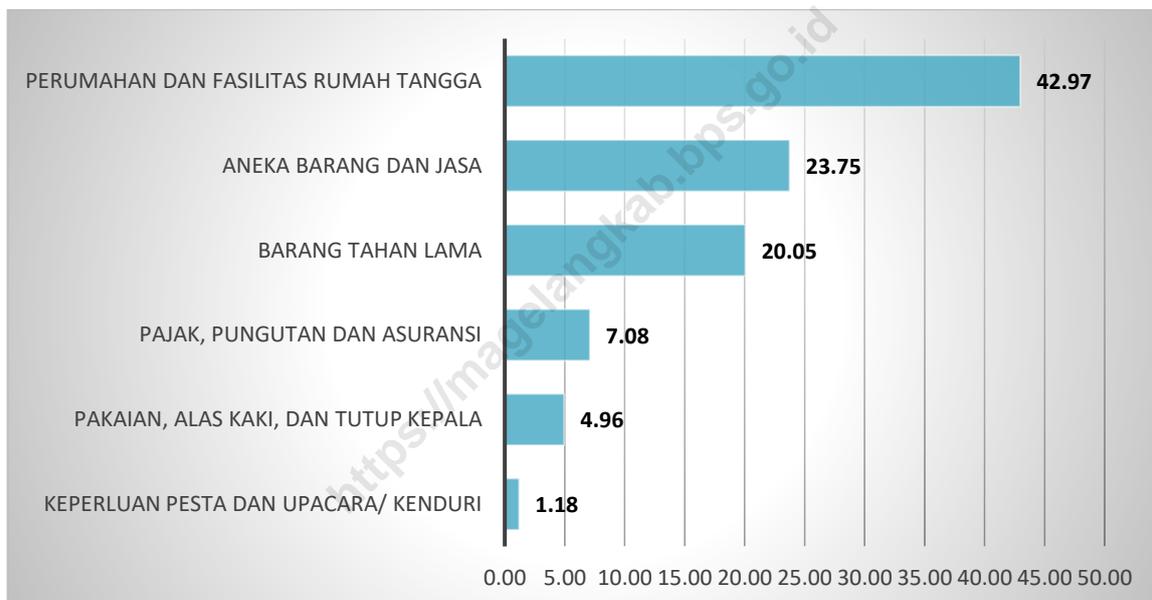
Pola konsumsi makanan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan pada Gambar 4.2.1 terlihat bahwa 5 kelompok komoditas makanan yang tertinggi adalah makanan dan minuman jadi (30,65 persen), tembakau dan sirih (12,51 persen), padi-padian (11,57 persen), sayur-sayuran (9,56 persen), dan telur dan susu (6,76 persen). Sedangkan kelompok komoditas lainnya sebesar 28,94 persen yang terdiri dari daging (4,69 persen), bahan minuman (4,52 persen), buah-buahan (4,20 persen), kacang-kacangan (3,50 persen), minyak dan kelapa (3,40 persen),

ikan/udang/cumi/kerang (3,36 persen), konsumsi lainnya (2,37 persen), bumbu-bumbuan (1,90 persen), dan umbi-umbian (1,02 persen).

4.2.2 Pola Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran untuk konsumsi non makanan terdiri dari pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk pakaian dan perlengkapannya, pengeluaran untuk barang tahan lama, pengeluaran untuk pajak, pungutan dan asuransi, dan pengeluaran untuk keperluan pesta.

Gambar 4.2.2
Pola Konsumsi Non Makanan menurut Kelompok Komoditas Tahun 2021



Sumber : Susenas Maret 2021

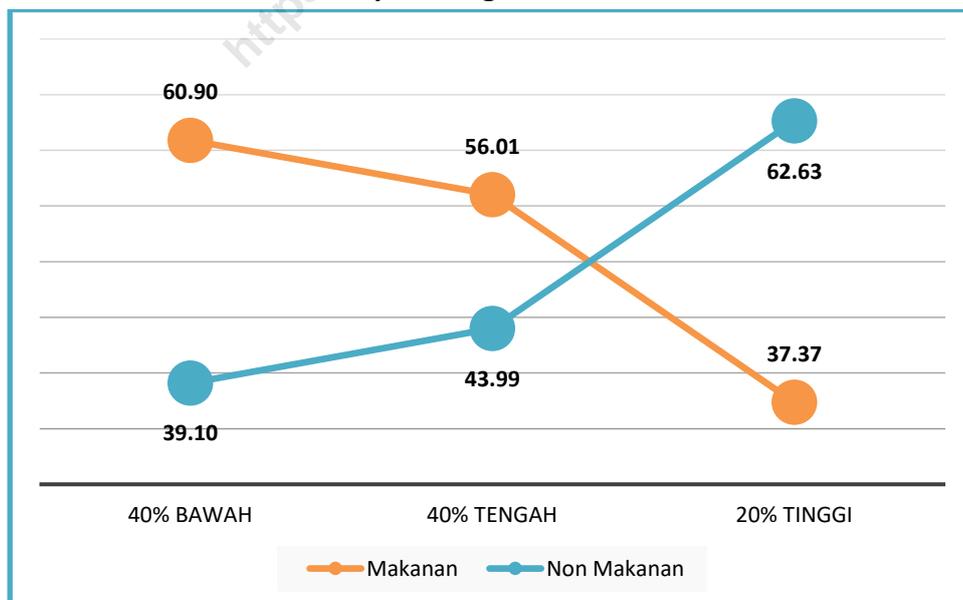
Pengeluaran untuk konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar 51,70 persen dari total pengeluaran. Pengeluaran untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar, yaitu 42,97 persen dari total konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga meliputi pengeluaran untuk perkiraan sewa rumah yang ditempati, atau nilai sewa/kontrak rumah yang ditempati beserta perbaikannya dan biaya untuk fasilitas listrik dan air, biaya konsumsi bahan bakar kendaraan dan perawatannya, biaya untuk bahan bakar memasak, perawatan rumah, dan konsumsi untuk komunikasi. Pengeluaran terbanyak kedua adalah untuk konsumsi aneka barang dan jasa sebesar 23,75 persen.

Kelompok ini mencakup kebutuhan pribadi untuk perawatan tubuh dan pakaian, biaya kesehatan, biaya pendidikan, transportasi, rekreasi dan jasa lainnya. Sedangkan konsumsi barang tahan lama yang mencakup pembelian atau penambahan barang tahan lama, termasuk alat elektronik, peralatan rumah tangga seperti mebel, sapu, barang pecah belah, dll menempati posisi ketiga sebesar 20,05 persen. Sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan pajak, pungutan, dan asuransi (7,08 persen), pakaian, alas kaki, dan tutup kepala (7,08 persen), dan keperluan pesta dan upacara/kenduri (1,18 persen).

4.3 Pola Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Pengelompokan penduduk berdasarkan pengeluaran dilakukan untuk melihat pemerataan pendapatan atau ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat tentu perlu menjadi bahan evaluasi belum meratanya hasil pendapatan di antara kelompok-kelompok penduduk. Bank Dunia membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu 40 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran bawah, 40 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran tengah, dan 20 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran tertinggi.

Gambar 4.3.
Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran Penduduk Tahun 2021



Sumber : Susenas Maret 2021

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa penduduk di kelompok pengeluaran bawah masih mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk konsumsi makanan, yaitu sebesar 60,90 persen. Sedangkan untuk kelompok tengah, komposisi pengeluaran makanan sudah lebih kecil tetapi masih dominan yaitu sebesar 56,01 persen. Sedangkan kelompok penduduk 20 persen tinggi pengeluaran konsumsi untuk makanannya paling kecil yaitu sebanyak 37,37 persen. Hal ini mendukung teori semakin membaiknya tingkat perekonomian penduduk, proporsi konsumsi untuk kebutuhan non makanan akan semakin tinggi.

Dari table 4.3 dapat ditunjukkan bahwa kelompok penduduk dengan pengeluaran terbesar mempunyai rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 2 185 727,-, nilai ini 2 kali lipat dibandingkan rata-rata pengeluaran kelompok penduduk tengah yang sebesar Rp. 849 695,-, dan 5 kali lipat rata-rata pengeluaran penduduk kelompok bawah yang sebesar Rp. 427 167,-. Perbedaan yang besar dalam rata-rata pengeluaran penduduk tiap bulan memperlihatkan kesenjangan pengeluaran yang cukup tinggi. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi komposisi konsumsi tiap kelompok pengeluaran. Penduduk dengan kelompok pengeluaran yang tinggi, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dibanding kelompok di bawahnya. Hal ini juga akan mempengaruhi pola konsumsi tiap kelompok.

Pola konsumsi makanan di setiap kelompok pengeluaran juga menunjukkan komposisi yang berbeda. Pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi menunjukkan nilai yang paling besar, yaitu sebesar Rp. 66 528,- untuk kelompok pengeluaran 40 persen bawah, Rp. 143 197,- untuk kelompok 40 persen tengah, dan Rp. 282 195,- untuk kelompok 20 persen atas. Meskipun urutan pengeluaran terbesarnya sama, yaitu makanan dan minuman jadi, namun pola konsumsi pengeluaran makanan untuk setiap kelompok berbeda. Untuk kelompok 40 persen bawah dan 40 persen tengah, konsumsi tertinggi setelah makanan dan minuman jadi adalah padi-padian, sayur-sayuran, telur dan susu, bahan minuman. Sedangkan untuk kelompok 20 persen atas, konsumsi tertinggi setelah makanan dan minuman jadi adalah sayur-sayuran, padi-padian, dan telur dan susu, dan buah-buahan.

Pengeluaran non makanan juga mempunyai pola yang hampir sama di ketiga kelompok pengeluaran. Pengeluaran terbesar adalah untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 4.3
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Per Bulan menurut Kelompok Komoditas dan
Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2021

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	49 296	52 156	61 926
Umbi-Umbian	2 629	5 065	8 019
Ikan	6 413	14 179	35 726
Daging	9 925	21 854	43 693
Telur dan Susu	15 683	31 201	60 862
Sayur-Sayuran	28 756	47 767	65 810
Kacang-Kacangan	12 896	17 543	19 150
Buah-Buahan	6 689	18 310	46 034
Minyak dan Kelapa	11 730	16 394	21 507
Bahan Minuman	14 469	22 179	30 186
Bumbu-Bumbuan	5 522	9 552	13 298
Bahan Makanan Lainnya	6 847	11 878	16 760
Makanan Minuman Jadi	66 528	143 197	282 195
Rokok dan Tembakau	22 763	64 625	111 646
Total Makanan	260 145	475 897	816 811
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	96 046	199 087	462 728
Aneka barang dan Jasa	35 025	86 980	337 941
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	7 808	21 011	63 914
Barang Tahan Lama	10 243	36 145	398 714
Pajak, Pungutan dan Asuransi	17 241	27 913	83 232
Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	659	2 660	22 398
Total Bukan Makanan	167 022	373 797	1 368 926
Total Pengeluaran	427 167	849 695	2 185 737

Sumber : Susenas Maret 2021

4.4 Pola Konsumsi Kalori Penduduk

Kalori adalah satuan kandungan panas atau energy yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan tubuh agar dapat beraktifitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Semua bahan makanan mempunyai nilai kalori yang berbeda-beda

berdasarkan jenisnya. Kebutuhan kalori masing-masing orang berbeda berdasarkan tingkat aktifitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019, tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia sebesar 2 100 kkal per orang per hari.

Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Magelang kelompok penduduk dengan pengeluaran 40 persen bawah sebesar 1 695,23 kkal, kelompok pengeluaran 40 persen tengah sebesar 2 155,63 kkal, dan kelompok pengeluaran 20 persen atas sebesar 2 455,31 kkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya kelompok pengeluaran 40 persen bawah yang belum memenuhi rata-rata angka kecukupan energi.

Tabel 4.4
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran Penduduk (kkal) Tahun 2021

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	712,36	719,38	672,86
Umbi-Umbian	36,86	41,57	43,43
Ikan	11,96	20,93	34,81
Daging	34,53	65,81	100,79
Telur dan Susu	34,31	67,21	91,69
Sayur-Sayuran	45,38	49,51	48,75
Kacang-Kacangan	67,68	87,76	84,07
Buah-Buahan	27,83	48,80	63,65
Minyak dan Kelapa	255,47	322,32	363,82
Bahan Minuman	101,45	141,08	166,46
Bumbu-Bumbuan	5,25	8,74	10,36
Bahan Makanan Lainnya	40,17	63,20	70,02
Makanan Minuman Jadi	321,96	519,31	704,62
Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00
Total Makanan	1 695, 23	2 155,63	2 455,31

Sumber : Susenas Maret 2021

Penyumbang kalori terbesar di tiap kelompok pengeluaran makanan berbeda di tiap kelompoknya. Untuk kelompok pengeluaran terbawah dan kelompok tengah, kalori terbanyak diperoleh dari konsumsi padi-padian yang sebesar 712,36 kkal dan 719,38 kkal. Untuk kelompok pengeluaran atas, kalori terbesar diperoleh dari makanan dan minuman jadi sebesar 704,62 kkal.

4.5 Pola Konsumsi Protein Penduduk

Protein merupakan salah satu nutrisi yang penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di dalam tubuh, protein dipecah menjadi asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan enzim, hormon, *neurotransmitter* (senyawa kimia dalam otak), dan antibodi. Tanpa asupan yang memadai tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Kandungan protein ada dalam tiap jenis makanan, meskipun besarnya persentase kandungan dalam tiap makanan/bahan makanan berbeda-beda. Kandungan protein yang tinggi terdapat dalam ikan dan biota laut lainnya, daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Sedangkan bahan pangan lainnya mempunyai kandungan protein yang lebih rendah.

Berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram per orang per hari. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, rata-rata konsumsi protein perkapita per hari penduduk Kabupaten Magelang adalah 44,86 gram untuk penduduk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, 60,23 gram untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah, dan 74,17 gram untuk kelompok pengeluaran 20 persen atas. Dari hasil tersebut dapat dilihat jika asupan protein ideal penduduk Kabupaten Magelang terpenuhi di kelompok pengeluaran tengah dan kelompok atas.

Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa kelompok pengeluaran 40 persen terbawah masih jauh di di bawah rata-rata angka kecukupan energi dan protein. AKG adalah kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat. Untuk memenuhi AKG, diperlukan untuk mengonsumsi makanan gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu susunan

pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktifitas fisik, perilaku hidup bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi.

Tabel 4.5
Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (gram) Tahun 2021

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	16,85	17,05	15,96
Umbi-Umbian	0,35	0,46	0,50
Ikan	1,86	3,28	5,28
Daging	2,24	4,26	6,47
Telur dan Susu	2,06	3,78	5,21
Sayur-Sayuran	3,01	3,13	3,03
Kacang-Kacangan	7,00	9,09	8,61
Buah-Buahan	0,25	0,47	0,66
Minyak dan Kelapa	0,24	0,35	0,41
Bahan Minuman	0,84	1,25	1,48
Bumbu-Bumbuan	0,20	0,33	0,39
Bahan Makanan Lainnya	0,75	1,13	1,32
Makanan Minuman Jadi	9,19	15,65	24,87
Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00
Total Makanan	44,86	60,23	74,17

Sumber : Susenas Maret 2021

BAB V

PENUTUP

Program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu aspek penting guna mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran dan profil kemiskinan yang tepat merupakan instrumen tangguh bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, di samping data seberapa besar jumlah dan persentase penduduk miskin, maka diperlukan pula untuk diketahui bagaimana kondisi kehidupan mereka melalui data karakteristik penduduk miskin.

Selain itu, pembangunan bukan hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk.

Publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2021” memberi kesimpulan tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada Tahun 2021 sebanyak 154,91 ribu orang (11,91 persen), bertambah sekitar 8,57 ribu orang dari tahun 2020 yang tercatat sebanyak 146,34 ribu jiwa (11,27 persen).
2. Garis kemiskinan Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Magelang meningkat sebesar Rp 11.178,- atau naik 3,26 persen dari tahun 2020, yaitu dari Rp. 342.430,- per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp. 353.608,- per kapita per bulan pada tahun 2021.
3. Pada Tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan naik 0,40 poin dari 1,23 pada Tahun 2020 menjadi 1,63 di Tahun 2021. Demikian juga

dengan nilai Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2021 yang menunjukkan nilai yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,35 dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,20.

4. Persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran makanan lebih kecil dibanding pengeluaran untuk konsumsi non makanannya akan tetapi terjadi peningkatan pada konsumsi pengeluaran makanan. Pola naiknya pengeluaran untuk makanan mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun.
5. Pengeluaran untuk konsumsi makanan didominasi oleh konsumsi makanan jadi, padi-padian dan rokok/tembakau sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, pengeluaran untuk kebutuhan aneka barang dan jasa, dan pengeluaran untuk barang tahan lama.
6. Pola konsumsi penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran menunjukkan selisih rata-rata pengeluaran yang sangat jauh dari tiap kelompoknya. Kelompok penduduk dengan pengeluaran atas mempunyai rata-rata pengeluaran 2,5 kali lipat dibandingkan rata-rata pengeluaran kelompok 40 persen tengah dan 5 kali lipat dibanding rata-rata pengeluaran kelompok 40 persen bawah.
7. Komposisi pengeluaran makanan kelompok pengeluaran bawah lebih besar dibanding pengeluaran non makanan sedangkan di kelompok pengeluaran atas, komposisi pengeluaran non makanan yang mempunyai komposisi jauh lebih tinggi.
8. Kelompok pengeluaran 20 persen atas dan 40 persen menengah sudah memenuhi rata-rata angka kecukupan energi sebesar 2 100 kkal per orang per hari sedangkan kelompok pengeluaran 40 persen bawah kelompok bawah belum memenuhi rata-rata angka kecukupan energi.
9. Asupan protein sebesar 57 gram per orang per hari di Kabupaten Magelang terpenuhi di kelompok pengeluaran 20 persen atas dan 40 persen menengah.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511
Telp/Fax : (62-293) 788143, E-mail : bps3308@bps.go.id
Homepage : <https://magelangkab.bps.go.id/>

